

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DAN
PENAGIHAN PAJAK ACEH

- ABSTRAK :
- Peraturan Gubernur ini ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan teknis dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025. Peraturan ini memberikan kepastian hukum dan pedoman baku bagi Pemerintah Aceh dalam menguji kepatuhan Wajib Pajak (WP) serta melaksanakan tindakan penagihan utang pajak guna mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh.
 - Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2026 memberikan kerangka hukum komprehensif bagi Pemerintah Aceh dalam menegakkan kepatuhan pajak secara profesional, objektif, dan transparan melalui prosedur pemeriksaan yang terukur serta penagihan pajak yang tegas demi mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh.
 - Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah; Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh.
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Januari 2026.
 - Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Aceh sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 34) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.